

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL	1721-B1
	H.1 NOMOR : 1000001451 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	:	688075993722000
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	BUDI RAHMAN

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
4	21-402-01	920.000	920.000	0	5	46.000

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota


B.8 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen					
	Nama Dokumen	Bukti Pembayaran	Tanggal	20	04	2022

B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.					
Nomor :	Tanggal				

B.10 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	
---	--

B.11 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :	
---	--

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	953350162722000				
C.2 Nama Instansi Pemerintah	:	RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur				
C.3 ID Subunit Organisasi	:					
C.4 Tanggal	:	21	04	2022		
C.5 Nama Penandatanganan	:	HARI JUMADI				
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.				
		<div></div> <div>PAWRLWFR</div>				

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.